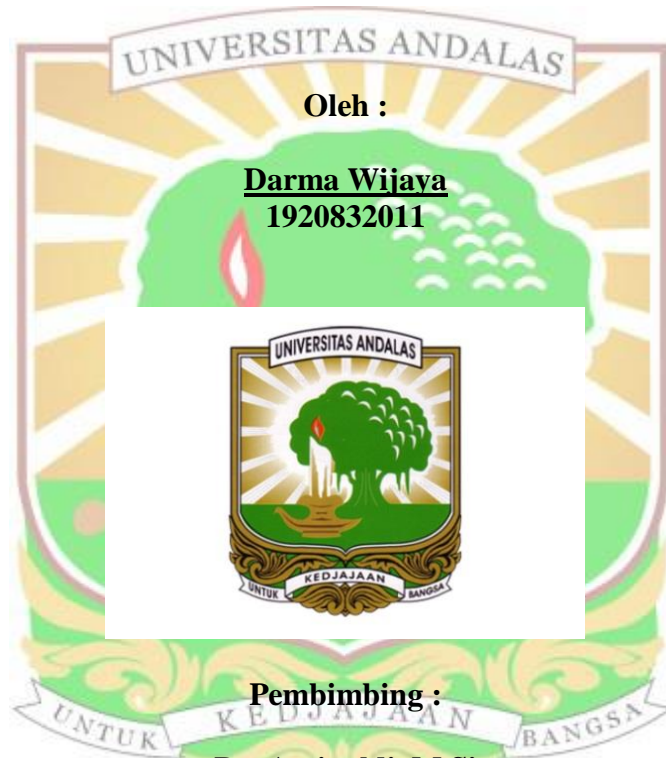


**PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019 :  
STUDI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*



**Dr. Asrinaldi, M.Si**  
**Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

### PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG

Oleh:

Darma Wijaya/ 1920832011

Pembimbing:

Dr. Asrinaldi, M.Si

Dr. Indah Adi Putri, M.IP

Kota Padang pada saat pemilu 2019 dilaksanakan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Penyebab terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) disebabkan oleh KPPS yang memberikan izin memilih di TPS kepada pemilih yang tidak terpenuhinya syarat untuk bisa memilih. Selain itu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga terjadi disebabkan oleh pemilih yang ikut memilih di TPS tersebut memiliki KTP Elektronik yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat TPS tempat pemilih memberikan hak pilih. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis peran Pengawas TPS dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan konsep peran pengawasan PTPS dan prinsip *Electoral Management Body*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi berdasarkan tema yang peneliti teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PTPS yang berada di Kecamatan yang melakukan PSU pada Pemilu 2019 yaitu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Namun, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala dengan pemahaman teknis penyelenggara pemilu penyebabnya bimbingan teknis yang tergolong singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih. Selanjutnya PTPS sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, namun masih kurang pada fungsi pencegahan dan penindakan.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Pengawasan

## **ABSTRACT**

### ***SUPERVISION ROLE POLLING STATION SUPERVISOR SIMULTANEOUS GENERAL ELECTION 2019: A CASE RE-VOTING ELECTION IN PADANG CITY***

By:

*Darma Wijaya/ 1920832011*

Supervisors:

*Dr. Asrinaldi, M.Si  
Dr. Indah Adi Putri, M.IP*

*At the time of the 2019 general election, Padang City held a re-voting (PSU) in 6 sub-districts, namely East Padang District, Nanggalo District, Kuranji District, Koto Tengah District, Lubuk Begalung District, and Lubuk Kilangan District. The cause of the re-voting (PSU) was caused by KPPS giving permission to vote at TPS to voters who did not meet the requirements to be able to vote. In addition, re-voting (PSU) also occurs because voters who participate in voting at the TPS have an Electronic KTP whose domicile address is different from the address of the TPS where the voter casts his vote. This study aims to analyze the role of the TPS Supervisor in its application to voting and counting votes in the 2019 simultaneous elections in Padang City. This study uses a descriptive approach by using the concept of the PTPS supervisory role and the principles of the Electoral Management Body. The data were collected by using in-depth interview techniques and collecting documentation based on the themes that the researchers studied. The results of the study show that the implementation of the role of PTPS in the Sub-districts that carry out PSU in the 2019 Election is that they have carried out their main tasks and are based on the principles of organizing elections. However, the implementation of PTPS duties is still constrained by the technical understanding of the election organizers due to the relatively short technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote. Furthermore, PTPS carries out its supervisory function well, but is still lacking in prevention and enforcement functions.*

**Keywords:** *Election, Re-Voting, Role Polling*